

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUKABUMI

Oleh :

Mutia Maharani, Rizki Hegia Sampurna, Dine Meigawati

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email Korespodensi : mutiamaharani007@ummi.ac.id

Abstrak

Zakat Produktif merupakan pemberian modal usaha melalui dana bergulir kepada *mustahik*, dan dana yang diberikan adalah hak *mustahik*. Tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi yaitu memberikan pendampingan melalui pola Bina Ruhiyah dan Bina Rupiah agar dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya karena program ini berjangka panjang yaitu selama 40 pekan. Tujuan dari Zakat Produktif yaitu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan para peserta untuk berzakat dan berinfaq dengan pola pendampingan yaitu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu, agar penelitian ini dapat hasil yang akurat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas kebijakan produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Sukabumi yang tidak mengikuti Program ini serta banyaknya para pendamping program yang statusnya sudah nonaktif sehingga menghambat pengimplementasian dari kebijakan zakat produktif ini.

Kata kunci : Kebijakan Publik , Efektivitas, Zakat Produktif, Badan Amil Zakat Nasional.

Abstract

Productive Zakat is the provision of business capital through a mustahik revolving fund, and the funds given are mustahik rights. The task of the National Amil Zakat Agency of Sukabumi Regency is to provide assistance through the Bina Ruhiyah and Bina Rupiah patterns so that the funds are used as shown because this program is long-term, namely for 40 weeks. tithe and give infaq with a pattern of assistance, namely. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach and the use of triangulation of sources, techniques and time, so that this research can get accurate results. The purpose of this research is to find out the evaluation of productive policies in BAZNAS Sukabumi Regency. In this study, it was concluded that there are still many underprivileged people in Sukabumi Regency who do not participate in this program as well as many companion programs whose status has been deactivated thus hampering the implementation of this productive zakat policy.

Keyword : Public Policy, Effectiveness, Productive Zakat, National Zakat Charity.

A.Pendahuluan.

Zakat Produktif diatur dalam Perundang-undangan di Indonesia yaitu terdapat pada UU No 23 Tahun 2011 pasal 7 yang berbunyi bahwa “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dalam meningkatkan kualitas umat”. Dalam definisi lain, terdapat praktik yang bernama “Filantropi”.

“Filantropi merupakan suatu sikap yang mempunyai kepedulian terhadap sesama dan dilakukan tanpa adanya paksaa. Istilah filantropi merupakan konsep filosofis yang dirumuskan dalam rangka memaknai hubungan antar manusia dan rasa cinta seseorang atau sekelompok orang kepada sesamanya. Rasa cinta tersebut diekspresikan diantaranya melalui tradisi berderma atau meberi. Konsep filantropi berhubungan erat dengan rasa kepedulian, solidaritas dan relasi sosial antara orang miskin dan kaya, antara yang kuat dan yang lemah, antara yang beruntung dan tidak beruntung, serta antara kuasa dan tuna-kuasa.” (Latief, 2013)”

Maka dari itu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sukabumi mengimplementasikan Kebijakan Zakat Produktif melalui Program Sukabumi Sejahtera melalui kegiatan BUMI (Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi). Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target) (Marzali, 2014:19).

Sukabumi Sejahtera merupakan Program unggulan di BAZNAS Kabupaten Sukabumi dengan menerapkan pola berupa pemberian modal usaha melalui dana bergulir kepada *mustahik*. Dana yang

diberikan adalah hak *mustahik*, tugas BAZNAS yaitu memberikan pendampingan agar dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya karena program ini berjangka panjang.

Tujuan dari Program Sukabumi Sejahtera yaitu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemampuan mustahik untuk mandiri dalam kebersamaan, bukan hanya meningkatkan pendapatan para peserta akan tetapi untuk meningkatkan pula nilai keimanan dan ketaqwaan para peserta untuk berzakat dan berinfaq dengan pola pendampingan yaitu melalui pola Bina Ruhiyah dan Bina Rupiah. Dengan harapan masyarakat mampu secara mandiri dapat mengembangkan usaha, melalui program pembinaan menuju masyarakat *munifik* (pemberi berinfaq) lalu *muzakki* (pemberi zakat). (*Baznas Kabupaten Sukabumi, 2016*)

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu proses tahapan dalam kebijakan publik, setelah kebijakan tersebut di implementasikan. Jika suatu kebijakan memberikan manfaat yang begitu besar dan dapat memecahkan masalah di masyarakat dengan menggunakan kriteria yang digunakan. Dunn (2003:608) mengungkapkan bahwa istilah Evaluasi dalam suatu analisis kebijakan yaitu sebagai berikut :

“Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing – masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (ratting) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”.

Evaluasi kebijakan merupakan suatu pengukuran terhadap suatu program atau kebijakan yang telah dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan tujuan kebijakan ataupun belum mencapai tujuan, sehingga evaluasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dalam mengukur evaluasi suatu kebijakan dibutuhkan kriteria pengukuran. Adapun model evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh Dunn (2003:610) yaitu Efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

Faktor keberhasilan Sukabumi Sejahtera salah satunya ditentukan oleh pendamping program karena memiliki peran sebagai fasilitator. Pendamping bertugas untuk memberikan pendampingan serta pembinaan kepada peserta Sukabumi Sejahtera. Dalam Program Sukabumi Sejahtera terdapat pengurus koordinator sekaligus Ketua program yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program tersebut. Pengurus koordinator mempunyai tugas yaitu melakukan koordinasi dengan pendamping yang ada di setiap Desa/Kelompok binaan. Pendamping bertugas untuk memberikan pendampingan serta pembinaan kepada peserta Program Sukabumi Sejahtera. Sebagai pendamping sudah seharusnya memiliki kemampuan inovatif dan kreatif, agar peserta program mampu mendayagunakan dana tersebut dengan semaksimal mungkin dengan binaan dari para pendamping.

Setiap peserta berhak menerima modal sebesar Rp.1.000.000 untuk waktu 40 pekan, satu kelompok beranggotakan 25 peserta. Adapun kewajiban setiap peserta yaitu setoran pokok sebesar Rp.25.000/orang. Dana tersebut tidak akan masuk ke BAZNAS, namun untuk dikembalikan lagi kepada mereka pada tahun berikutnya, dengan tujuan agar dana yang sebelumnya diterima mustahik tidak hilang oleh karena itu harus melakukan setor wajib setiap pekannya selama 1 tahun

tersebut. Lalu karena ini program dari BAZNAS, maka erat hubungannya dengan zakat. Masyarakat belajar zakat yaitu dengan dimulai dengan infaq biasanya infaq ini di tujuhan untuk pendamping mereka, lalu yang terakhir adalah tabungan sukarela dimana setiap peserta diberi kesempatan untuk menabung, namun hanya untuk peserta yang berminat untuk menabung saja.

Dalam Pelaksanaan Program Sukabumi Sejahtera, BAZNAS Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan program ini dengan semaksimal mungkin, tetapi berdasarkan observasi awal dan wawancara yang peneliti lakukan terdapat beberapa fenomena masalah yaitu :

Pertama, masih banyak masyarakat miskin di kabupaten Sukabumi yang belum mendapatkan bantuan dari Program Sukabumi Sejahtera. Sedangkan tujuan utama dari Program Sukabumi Sejahtera yaitu mengentaskan kemiskinan. Berikut data masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Sukabumi dan data masyarakat yang telah menerima bantuan dari Program Sukabumi Sejahtera :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sukabumi

Nama Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin		
	2017	2018	2019
Sukabumi	197.100 jiwa	166.300 jiwa	153.300 jiwa

(Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi,2019)

Tabel 1.2
Peserta Program Sukabumi Sejahtera

Tahun	Kelompok / Desa/ Kelurahan	Jumlah penerima manfaat	Ber-masalah	Non Aktif
2017	17 Desa/ Kelurahan	425 orang	1	6
2018	11 Desa/ Kelurahan	275 Orang	3	-
2019	1 Desa/ kelurahan	25 Orang	-	-
2020	2 Desa/ kelurahan	50 Orang	-	-
Total	41 Desa/ Kelurahan	775 orang	4	6

(Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi, 2020)

Dilihat dari kedua tabel tersebut bahwa masih banyak masyarakat yang tergolong miskin, namun belum mendapatkan bantuan Program Sukabumi Sejahtera dan dilihat dari total 386 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Sukabumi, hanya 41 Desa yang mengikuti Program ini terhitung mulai dari 2016-2020. Adapun pada tahun 2020 yang menerima bantuan dari Program ini yaitu Desa Nagrak kecamatan Cisaat, dan Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh. Dapat dilihat dari tabel diatas dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan peserta program, jumlah penerima Program Sukabumi Sejahtera disebabkan karena dana yang terbatas, dan dilihat dari prosedur yang diberlakukan bahwa tidak semua Desa atau daerah mengalami kecocokan. Biasanya kecocokan program ini jika diimplementasikan di daerah-daerah yang sistem ekonominya berjalan setiap hari seperti warung, pedagang kaki lima, dan kurang cocok untuk Desa/daerah yang mayoritasnya pertanian atau peternakan dikarenakan setoran pokoknya yaitu setiap pekan. (Wawancara dengan Sekretaris Koordinator Program Sukabumi Sejahtera, 24 Juni 2020).

Kedua, dalam pengimplementasiannya terdapat kelompok/peserta yang

bermasalah dan non aktif. Bermasalah disini yaitu kelompok yang tidak membayar setoran pokok, akan tetapi masih bisa dilanjutkan lagi. Namun untuk kelompok/peserta yang tidak aktif, sudah tidak bisa mengikuti program ini.

Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa masih ada kelompok yang bermasalah dan bahkan Non Aktif, hal ini disebabkan karena peserta yang tidak membayar setoran pokok secara penuh. Meskipun peserta tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana yang yang sudah diberikan oleh BAZNAS, karena pihak BAZNAS hanya melaksanakan pendampingan agar dana tersebut tidak hilang. Akan tetapi dengan adanya kelompok yang bermasalah hal ini berdampak pada penilaian BAZNAS Kabupaten Sukabumi untuk mempertimbangkan apakah pada periode tahun berikutnya masih bisa diikutsertakan atau tidak.

Ketiga, banyak pendamping yang statusnya sudah non aktif sehingga menghambat implementasi dari Program Sukabumi Sejahtera. Dari total 17 Pendamping, hanya 6 orang saja yang masih aktif. Hal ini dikarenakan yang menjadi pendamping adalah relawan dengan upah Rp.500.000/Bulan, itupun hanya selama 1 tahun karena pada tahun berikutnya mereka hanya mendapatkan infaq dari peserta program binaannya. Oleh karena itu dikarenakan mereka adalah relawan, maka dituntut untuk bekerja ikhlas memberikan pembinaan secara Ruhiyah dan Rupiah.

Tabel 1.3
Profesi Utama dan Status Pendamping
Sukabumi Sejahtera

No	Profesi Utama Pendamping	Status	
		Aktif	Tidak Aktif
1	Guru	4	6
2	Dosen	-	1
3	Wirausahawan	-	2
4	PKH	1	1
5	Honoror	1	-
6	Serabutan	-	1

(Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi, 2020)

Jika dilihat dari pekerjaan utama dari para pendamping, lebih banyak yang bekerja sebagai tenaga pengajar/guru dibandingkan sebagai wirausahawan, hal ini tentu menimbulkan suatu permasalahan karena seharusnya yang menjadi pendamping ialah mereka yang memiliki kemampuan berwirausaha agar dapat memberikan pendampingan yang tepat kepada peserta program sesuai dengan bidangnya.

Keempat, anggaran yang sediakan BAZNAS untuk Program Sukabumi Sejahtera terbilang belum cukup untuk mendanai sebanyak 386 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Adapun anggaran yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4
Anggaran Program Sukabumi Sejahtera

No	Tahun	Anggaran	Penambahan Kelompok
1	2018	275.000.000	11
2	2019	25.000.000	1
3	2020	50.000.000	2

(Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi, 2020)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh BAZNAS untuk program Sukabumi Sejahtera mengalami penurunan. Pada tahun 2019 mengalami penurunan yang drastis karena

alokasi untuk zakat produktif beralih ke program baru yang berasal dari BAZNAS Pusat yaitu bernama ZCD (Zakat Community Development).

Dalam fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai evaluasi kebijakan zakat produktif melalui program Sukabumi Sejahtera pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode ini juga bertujuan untuk mengungkap fakta dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menjelaskan apa adanya. Selain itu, metode deskriptif harus searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah, hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Sampel dari penelitian kualitatif tidak disebut responden melainkan narasumber, partisipan, dan informan.

Teknik pengumpulan data adalah salah satu komponen yang paling penting dalam proses penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data dan informasi untuk mengevaluasi kebijakan zakat produktif melalui Program Sukabumi Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Ada beberapa teknik dalam

pengumpulan data yang akan peneliti lakukan diantaranya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun dua jenis kelompok data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini untuk dapat melakukan validasi data dengan beberapa teknik yaitu dengan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2017:330) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data untuk memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Terdapat 3 jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Analisis data dilakukan setelah menelaah seluruh data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang sudah melalui tahap triangulasi maka dilakukanlah analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini untuk mengukur Evaluasi kebijakan zakat produktif melalui program sukabumi sejahtera pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi yaitu menggunakan 6 dimensi yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003:610). Dalam teori tersebut, bahwa untuk melihat keberhasilan dari evaluasi kebijakan zakat produktif yaitu terdiri dari 1). Efektivitas 2) Efisiensi 3) kecukupan 4) Responsivitas 5) Ketepatan.

Efektivitas

Dalam penelitian ini efektivitas berisi tentang pencapaian target pelaksanaan Program Sukabumi Sejahtera, serta tujuan utama dari Program Sukabumi Sejahtera yaitu mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Sukabumi, dengan cara memberikan bantuan modal sebesar Rp.1.000.000/orang. Pada tahun pertama uang tersebut dikelola oleh pendamping yang bertugas memberikan pembinaan dan

pendampingan kepada peserta program. Sedangkan pada tahun berikutnya, peserta melakukan pengelolaan secara mandiri.

Pada kriteria efektivitas dari program ini dapat di simpulkan bahwa masih kurang. Hal ini dikarenakan masih banyak Desa yang belum mengikuti Program Sukabumi Sejahtera, sedangkan tujuannya 1 Desa 1 Baitul Mal, akan tetapi yang peneliti temukan bahwa ada data kelompok yang tidak mengatasnamakan Masjid serta pendaftaran peserta ada yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Lalu pada pengimplementasian modal usaha yang telah diberikan tidak hanya harus berkembang, akan tetapi juga ada aspek lain yang diperhatikan yaitu zakat, infaq dan sedekah secara konsisten dan berbisnis sesuai dengan syariat islam.

Pada dasarnya program ini hanya berjalan 1 tahun, ketika tahun berikutnya para pendamping tidak mempunyai kewajiban untuk membina dan mendampingi para peserta, serta peserta pun jika masih menjadi peserta atau tidaknya tidak mendapatkan keuntungan lagi. Hal ini dikarenakan modal yang diberikan pada tahun kedua dan tahun berikutnya nominalnya tidak bertambah. Hal ini yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi lagi untuk mengikuti program ini pada tahun berikutnya.

Efisiensi

Pada kriteria ini peneliti menganalisis mengenai efisiensi program Sukabumi Sejahtera dari segi usaha, biaya dan segi waktu. Karena program ini mencakup 3 hal tersebut, maka dari segi usaha BAZNAS melakukan sosialisasi terhadap BAZ setempat, lalu setiap kelompok diberi 1 pendamping untuk mendampingi serta membina peserta agar uang yang diberikan BAZNAS dapat dikelola dengan baik sebagaimana mestinya.

Tanggapan yang disampaikan para informan, serta temuan peneliti bahwa dalam kriteria efisiensi ini, usaha yang

dilakukan BAZNAS sudah tepat yaitu sosialisasi dan memberikan pendampingan, namun dalam pendampingan ini yang masih bermasalah. Dari data dapat dilihat pada tabel 1.3 bahwa yang menjadi pendamping adalah seorang guru, dosen pegawai yang tidak mempunyai latarbelakang kewirausahaan, maka akan lebih efektif jika yang menjadi pendamping adalah seorang wirausaha, yang mengerti bagaimana menyusun strategi agar peserta dapat berkembang lebih maju lagi, karena tujuannya mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dari segi waktu, terjadi penurunan kinerja yang dimana, pada tahun sebelumnya para pendamping rajin untuk memberikan pendampingan akan tetapi baru – baru ini para pendamping mengakui memang jarang melakukan pendampingan. Dari segi biaya yang diberikan BAZNAS Kabupaten sukabumi untuk program ini yaitu senilai Rp.1.000.000/orang maka dirasa cukup, karena tugas pendampinglah yang harus bisa inovatif terhadap apa yang terjadi pada peserta melalui pembinaan dan pendampingan yang dilakukan.

Kecukupan

Kebijakan zakat produktif, yang terdapat pada Program Sukabumi Sejahtera yaitu bertujuan agar uang yang diberikan BAZNAS Kabupaten Sukabumi dapat dikelola dengan baik untuk modal usaha oleh peserta program melalui proses pendampingan. Maka dalam hal ini program Sukabumi Sejahtera memberikan dana kepada masyarakat yang digunakan untuk penambahan modal, untuk masyarakat yang kurang mampu.

Pada kriteria Kecukupan yaitu program ini sangat membantu masyarakat dalam penambahan modal, sehingga keuntungan yang diperoleh pun dapat bertambah, karena modal yang dimiliki otomatis juga bertambah dan membantu perekonomian masyarakat di kalangan

kurang mampu, meskipun jika dilihat dari respon informan dari pihak penerima bantuan, mereka kurang puas dengan bantuan anggaran yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi.

Perataan

Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Dalam program Sukabumi Sejahtera, dana didistribusikan secara merata kepada peserta yaitu sebesar Rp.1.000.000/orang.

Dalam kriteria perataan, program ini sudah baik karena dana yang diberikan sama rata yaitu senilai Rp.1.000.000, tidak berbeda-beda setiap pesertanya, dan hal ini sudah sesuai dengan SOP yang diberlakukan sebelumnya.

Responsivitas

Dalam program Sukabumi Sejahtera, suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan program yang diikuti. Dikarenakan wilayah Sukabumi yang sangat luas, maka terbentuk juga kelompok kelompok bidang usaha, seperti di daerah pedesaan cenderung memilih untuk bertani dan beternak, sedangkan untuk daerah perkotaan cenderung membuka usaha seperti warung sembako, jajanan anak, dan kebutuhan lainnya.

Dalam kriteria Responsivitas pada program ini mempunyai kekurangan karena tidak semua daerah di Kabupaten Sukabumi cocok mengikuti program ini, apalagi Kabupaten Sukabumi yang wilayahnya sangat luas, tentu setiap daerah mempunyai kebutuhan yang berbeda. Tetapi tanggapan dari peserta program bahwa mereka puas dengan program ini, meskipun beberapa bulan terkena musibah pandemi COVID-19 dan mengalami hambatan.

Ketepatan

Dalam program Sukabumi Sejahtera, ketepatan berkaitan dengan ketepatan dari sasaran program, dimana yang menjadi sasaran dari program ini adalah masyarakat miskin, tetapi yang sudah mempunyai usaha.

Dalam kriteria Ketepatan, program Sukabumi Sejahtera dapat dikatakan sudah baik karena diketahui bahwa program ini dibuat untuk memecahkan masalah yang ada di kabupaten sukabumi, yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dan sudah mempunyai usaha agar usaha yang dimiliki semakin berkembang melalui pendampingan yang diberikan oleh para pendamping dari BAZNAS Kabupaten Sukabumi.

D.Kesimpulan Dan Saran**Kesimpulan**

Evaluasi terhadap Program Sukabumi Sejahtera yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa secara keseluruhan program ini telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan agar implementasinya lebih efektif. Salah satu masalah utama adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program ini, dengan sosialisasi yang hanya terbatas pada BAZ Kecamatan setempat, padahal informasi seharusnya dapat lebih meluas agar bisa diakses oleh masyarakat secara lebih luas. Selain itu, dalam hal pendampingan, terdapat kekurangan dalam pelaksanaan prosedur yang sudah ditetapkan, di mana seharusnya pendamping melakukan pendampingan setiap pekan, namun kenyataannya hal ini tidak selalu terlaksana. Kinerja pendamping juga dirasa masih kurang maksimal, dengan banyaknya status pendamping yang non-aktif.

Walaupun bantuan dana yang diberikan terbilang minim, yakni sebesar Rp. 1.000.000 per orang, tugas pendamping seharusnya lebih fokus pada pemberdayaan peserta untuk mengelola dana tersebut dengan strategi yang tepat guna mengembangkan usaha mereka. Program ini juga dinilai kurang cocok di beberapa daerah, terutama di daerah pedesaan, namun bagi sebagian peserta yang memiliki usaha berdagang, mereka merasa puas meskipun terhambat oleh situasi pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, sasaran program ini sudah tepat karena peserta adalah masyarakat yang kurang mampu namun telah memiliki usaha. Dengan memperbaiki aspek-aspek yang menjadi kendala, diharapkan program ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Rekomendasi/Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi dan peneliti selanjutnya. Pertama, BAZNAS perlu memanfaatkan sosial media secara lebih maksimal untuk menyebarkan informasi terkait Program Sukabumi Sejahtera, mengingat peran penting media sosial dalam penyebaran informasi yang lebih luas. Selain itu, program ini perlu menyeimbangkan aspek Bina Ruhiyah dan Bina Rupiah, dengan fokus pada peningkatan kemampuan berwirausaha masyarakat agar dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi.

Pendamping program juga perlu dipilih berdasarkan kualifikasi yang relevan, seperti pengalaman berwirausaha atau latar belakang di bidang ekonomi dan bisnis, agar mereka dapat memberikan pendampingan yang lebih efektif. Pemilihan satu pendamping per kecamatan juga disarankan untuk meningkatkan

efektivitas program dan mengurangi biaya transportasi. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk fokus pada evaluasi lebih mendalam terhadap sumber daya manusia di BAZNAS Kabupaten Sukabumi, khususnya dalam aspek pendampingan, yang masih dirasa kurang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dunn, W. N.2003 *Pengantar analisis kebijakan publik*, Edisi kedua.Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Marzali,A.2014.Antrpologi Analisis Kebijakan Publik.Kencana
- Moleong. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta a: Remaja Rosdakarya

Jurnal

- Latief.H. 2016. Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*,28 (1), 123.

Aturan dan Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dokumen :

- Renstra Baznas Kabupaten Sukabumi.2016